



Media: Radar

Hari: Selasa

Tanggal: 17 Maret 2020

Halaman: 2

Pemkot Diminta Buat Peta Bidang ZNT

Sudah Ada 4.173 WP
yang Bayar PBB

JOGJA, Radar Jogja - Menyelesaikan polemik kenaikan SPPT PBB 2020 ini, Komisi A DPRD Kota Jogja sudah melakukan koordinasi dengan Kantor Pertanahan Kota Jogja. Sesuai rekomendasi rapat konsultasi DPRD Kota Jogja bersama Pemkot Jogja, pada Senin (2/3) lalu. Hasilnya mereka mendorong Pemkot Jogja melakukan penganggaran untuk membuat sub bidang atau peta bidang zona

nilai tanah (ZNT). Ini sebagai acuan untuk menentukan ketetapan pajak bumi dan bangunan (PBB) sesuai dengan zona wajib pajak (WP).

Ketua Komisi A DPRD Kota Jogja Dwi Candra Putra mengatakan, dalam penentuan NJOP pemkot masih menggunakan ZNT yang dikeluarkan oleh BPN Wilayah. Padahal kenaikan NJOP yang kurang sesuai di berbagai wilayah dikarenakan sampai saat ini pemkot belum memiliki sub bidang ZNT. "Selama ini yang dikeluarkan masyarakat tanah yang di pinggir jalan den-

gan pinggir sungai bisa sama karena dalam satu zona yang sama. Padahal nilai ekonominya berbeda," katanya dihubungi kemarin (16/3).

Politikus Partai Nasdem itu menjelaskan, dengan penentuan peta bidang ZNT bisa lebih mendetailkan mengenai kondisi real di lapangan para WP sebagai acuan penentuan NJOP yang berdampak terhadap ketetapan PBB. "Sehingga lebih realistis harga NJOP tanah yang di pinggir jalan dengan di pinggir sungai jelas akan berbeda," ujarnya. Menurut dia, selama ini pem-



Dwi Candra Putra

kot belum menganggarkan untuk membuat peta bidang ZNT. Maka melalui komisi A fraksi nasdem khususnya akan

mengawal konteks ini agar dapat dianggarkan pada anggaran perubahan. Sebagai mitra BPN, Komisi A akan mendorong di dalam anggaran perubahan untuk prioritas penganggaran terwujudnya sub bidang ZNT. "Dengan lebih dulu dilakukan PKS (Perjanjian Kerja Sama) antara pemkot dan BPN," jelasnya.

Di samping itu dalam fungsi legislasi Candra yang juga Wakil Ketua Fraksi Nasdem memastikan anggota fraksinya yang ada di Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemper-

da) untuk mengusulkan perubahan atas Perda nomor 2 tahun 2011 tentang PBB. Sehingga penentuan tarif PBB dapat disesuaikan. "Masyarakat juga tahu alasan apa jika dinaikkan, selama ini kan sosialisasi ke masyarakat kurang," ungkapnya.

Sementara, Kepala BPKAD Kota Jogja, Wasesa mengatakan proses penganggaran peta bidang ZNT pada APBD perubahan membutuhkan proses sangat panjang dan teknis. Sehingga diperkirakan tak akan berpengaruh pada ketetapan SPPT PBB 2020 ini. "Harapannya bisa ka-

mi lakukan di anggaran perubahan (peta bidang). Proses tentu harus ada proposal masuk ke kita pasti nunggu momen perubahan APBD, ya pasti sesudah Juli," katanya.

Mantan Kepala Bagian Pengendalian Pembangunan Pemkot Jogja itu menambahkan, perkembangan hingga akhir februari, dia mencatat PBB yang sudah masuk sekitar Rp 2,9 miliar dari 4.173 WP. "Ini yang sudah bayar pajak," imbuhnya sembari menyampaikan masih melayani WP yang mengajukan keberatan untuk keringanan. (wia/pr/er)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005